

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun selama tahun 2022 hingga 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Sangat Baik**

Pada rentang waktu 2022–2024, pemungutan PBB di Kabupaten Madiun menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, efektivitas tercatat sebesar 102,82%, tahun 2023 mencapai 102,45%, dan tahun 2024 sebesar 102,60%. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan sistem pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

##### **2. Kontribusi PBB terhadap PAD Masih Minim**

capaian efektivitas tinggi, kontribusi PBB terhadap keseluruhan PAD masih termasuk dalam kategori sangat rendah. Persentase kontribusi hanya sebesar 6,81% pada tahun 2022, meningkat menjadi 8,23% pada tahun 2023, dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa

meskipun penerimaan dari PBB meningkat secara nominal, peran PBB dalam keseluruhan struktur pendapatan daerah masih belum dominan jika dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya.

### 3. Langkah Strategis Bapenda

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor PBB, Bapenda Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai terobosan strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pemutakhiran data objek pajak, penerapan sistem pembayaran berbasis digital, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan penagihan melalui pendekatan aktif. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi, tantangan seperti akurasi data objek pajak dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi ke depan.

## **B. IMPLIKASI**

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yang dapat ditinjau dari sisi praktis maupun teoritis, antara lain:

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam pemungutan pajak secara efektif tidak selalu sejalan dengan besarnya kontribusi pajak terhadap total pendapatan daerah.

Artinya, kinerja administratif yang baik dalam mencapai target penerimaan belum tentu mencerminkan peran pajak yang besar dalam struktur pendapatan daerah, khususnya di wilayah yang memiliki berbagai sumber PAD.

## 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, terutama Bapenda Kabupaten Madiun, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan PBB. Pemerintah perlu mengupayakan perluasan cakupan objek pajak, meningkatkan kualitas pendataan, serta menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan porsi kontribusi PBB terhadap PAD. Di samping itu, perlu adanya penguatan kolaborasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

## **C. SARAN**

### 1. Perluasan Cakupan dan Objek Pajak

Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas jangkauan objek pajak dengan cara menelusuri dan mendaftarkan aset-aset yang selama ini belum tercatat atau belum dikenakan PBB secara adil dan proporsional.

## 2. Penyesuaian NJOP yang Relevan dan Tepat

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) perlu disesuaikan secara berkala dan diselaraskan dengan harga pasar terkini agar nilai yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi aktual dan mampu meningkatkan potensi penerimaan secara optimal.

## 3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Pajak

Perlu dilakukan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat agar mereka memahami kewajiban membayar pajak sebagai wujud nyata kontribusi terhadap pembangunan daerah.

## 4. Penguatan Digitalisasi dan Sistem Pengawasan

Pengembangan sistem layanan dan pembayaran pajak berbasis digital perlu terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi, keterbukaan, dan kemudahan akses. Selain itu, pengawasan internal yang ketat harus diperkuat untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan.

## 5. Peninjauan Berkala terhadap Kebijakan PBB

Pemerintah daerah perlu secara rutin melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan PBB, mencakup aspek tarif, klasifikasi NJOP, hingga efektivitas implementasinya, agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan dinamika ekonomi lokal.